

# PROFIL MODERASI BERAGAMA MAHASISWA PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Sigit Priatmoko, Wiku Aji Sugiri, Rizki Amelia  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-mail: sigitpriatmoko@uin-malang.ac.id, wikusugiri@uin-malang.ac.id, rizkiamelia@uin-malang.ac.id

**Abstract:** *This study aims to explore the profile of religious moderation of prospective students of Madrasah Ibtidaiyah teachers. This goal is motivated by the strategic position of Madrasah Ibtidaiyah (MI) teachers in efforts to mainstream religious moderation and prevent radicalism from an early age. The researcher used a quantitative approach with a descriptive quantitative type. Respondents in this study were 106 students, with details of 81 (76.4%) Semester I students, 14 (13.2%) Semester V students, 9 (8.5%) Semester VII students, the remaining 2 (1.9%) Semester III students and 1 (0.9%) Semester VI students. Collecting data using a closed questionnaire instrument with a total of 25 questions. The questionnaire was created using the Google Form application and distributed through the student batch Whatsapp group. The questions in the questionnaire are based on four indicators of religious moderation developed by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, namely (1) national commitment, (2) tolerance, (3) anti-violence, and (4) acceptance of tradition. Data analysis used descriptive statistical analysis techniques where the researcher described the data collected as they were without generalizing. The results showed that almost all respondents met the indicators of religious moderation required by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This is evidenced by the high percentage of agree and strongly agree with the four indicators. However, even so, there are still respondents who show resistance to these four indicators. This fact has become a record of the Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, especially the Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education study program (PGMI).*

**Keywords:** *Religious Moderation, Students, Teachers, Madrasah Ibtidaiyah.*

## Pendahuluan

Pada 2019, Setara Institut melaporkan bahwa terdapat 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama yang terparar radikalisme. Kesepuluh PTN tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknik Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Mataram (Unram), Universitas Islam Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Bandung. Fenomena terpararnya ini sebenarnya sudah lama terjadi<sup>1</sup>. Temuan ini menghebohkan

---

<sup>1</sup> Pebriansyah Ariefana and Ummi Hadyah Saleh, "Menristek Sebut Sudah Lama 10 Perguruan Tinggi Terparar Radikalisme," *suara.com*, March 6, 2019,

dunia pendidikan nasional. Ditambah lagi, menurut Ryamizad Ryacudu ketika menjabat Menteri Pertahanan, sebanyak 23,4% mahasiswa Indonesia telah terpapar radikalisme<sup>2</sup>.

Menurut Joko Widodo, penyusupan radikalisme di kampus ini dilakukan oleh pihak-pihak di luar kampus yang mendidik mahasiswa mejadi radikal dan ekstrim. Merespons fenomena ini, menurut Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, pihak rektorat setiap kampus di Indonesia harus memantau aktivitas dakwah mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam kampus, maupun di luar kampus<sup>3</sup>. Azyumardi Azra menilai berkembangnya radikalisme di kampus saat ini dipicu oleh makin berkembangnya organisasi mahasiswa berpandangan kanan. Ada empat sebab akademisi menjadi radikal, yaitu (1) sebelum menjadi dosen, mereka sudah aktif di organisasi berpandangan kanan, (2) basis keilmuan yang hanya memandang dunia sebagai hitam-putih, (3) tidak memiliki pemahaman Islam yang komprehensi, dan (4) tidak memahami isu-isu politik Indonesia, misalnya demokrasi<sup>4</sup>.

Paham radikal di kampus dibawa oleh kelompok keagamaan yang berpandangan eksklusif dan monolitik seperti Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan Tahririyah. Terdapat tiga wacana atau propaganda utama yang dikembangkan oleh kelompok ini. Pertama, keselamatan hidup, baik diri maupun bangsa, hanya bisa diraih melalui ketaatan pada syariat Islam. Kedua, Islam sedang mengalami ancaman dari musuh-musuhnya, yaitu Kristen, Zionisme, Imperialisme Barat, Kapitalisme, serta kaum muslim sekular dan liberal. Ketiga, ajakan melawan berbagai ancaman tersebut melalui perang pemikiran atau *ghazw al-fikr*<sup>5</sup>. Selain tiga propaganda tersebut, sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra di atas, bahwa radikalisme sering dipicu oleh sempitnya cara pandang dan wawasan yang sempit terhadap agama. Pola piker normative (tekstualis) dan hitam-putih merupakan faktor dominan lahirnya radikalisme dan terorisme. Sejarah Islam sendiri mencatat, betapa bahayanya pola pikir demikian ini, hingga menyebabkan seorang ahli ibadah seperti Abdurrahman bin Mulzam berani dan tega membunuh Ali bin Abi Thalib<sup>6</sup>.

Terdapat berbagai cara untuk mencegah radikalisme menyusup ke kampus, di antaranya adalah dengan membumikan ajaran agama yang moderat atau moderasi

---

<https://www.suara.com/news/2019/06/03/135655/menristek-sebut-sudah-lama-10-perguruan-tinggi-terpapar-radikalisme> [21 Mei 2022].

<sup>2</sup> Muhamad Murtadlo, "Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi," *Government, Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), May 12, 2022, <https://kemenag.go.id/read/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi-6v3kp>; Lisy Sri Rahayu, "Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa di RI Terpapar Radikalisme," *detik.com*, July 19, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme> [21 Mei 2022].

<sup>3</sup> CNN Indonesia, "Ketua Komisi X Sebut Penyebaran Radikalisme di Kampus Nyata," *CNN Indonesia*, September 16, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915115742-32-694604/ketua-komisi-x-sebut-penyebaran-radikalisme-di-kampus-nyata>; Suwarno Suwarno, "Ancaman Radikalisme di Kampus Nyata, Warning Jokowi Masuk Akal," *SINDONEWS.com*, September 15, 2021, <https://edukasi.sindonews.com/read/541218/144/ancaman-radikalisme-di-kampus-nyata-warning-jokowi-masuk-akal-1631682597> [21 Mei 2022].

<sup>4</sup> Arbi Sumandoyo, "Radikalisme di Kampus Berkembang Karena Tak Ada Gerakan Tandingan," *tirto.id*, July 20, 2018, <https://tirto.id/radikalisme-di-kampus-berkembang-karena-tak-ada-gerakan-tandingan-cPqQ> [21 Mei 2022].

<sup>5</sup> S. H. Asriani and ASR MH, "Radikalisme Pemahaman Keagamaan Pada Mahasiswa Muslim Di Perguruan Tinggi Agama Islam Di Provinsi Lampung." (LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>6</sup> Muhammad Saekun Muchith, "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan," *Addin*, 10 (1) 2016: 163–80.

beragama. Menurut Syafiq A. Mughni, setidaknya terdapat tujuh ciri moderasi beragama dalam Islam. Pertama, tawazun atau keseimbangan hidup antara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kedua, Tasamuh atau toleransi sebagai suatu sikap yang harus dimiliki dalam konteks hidup di negara yang beragam seperti Indonesia. Ketiga, I'tidal atau tegak, konsisten dalam keadilan. Sikap ini penting dalam menjaga pergaulan kehidupan bangsa dan negara. Keempat, Ishlah atau perbaikan hidup baik ke dalam diri, maupun ke luar diri. Kelima, prinsip syura atau musyawarah yakni menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keenam, qudwah atau keteladanan. Ketujuh, Muwathanah yaitu kewarganegaraan atau nasionalisme<sup>7</sup>.

Penelitian mengenai moderasi beragama di perguruan tinggi telah dilakukan dan menghasilkan berbagai informasi penting.<sup>8</sup> mengungkap upaya Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta membendung radikalisme mahasiswa melalui Program P3KMI (Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral). Sayangnya, materi yang diajarkan melalui buku pedoman justru terindikasi memuat ajaran kelompok eksklusif dan berhaluan kanan, Gerakan Tarbiyah. Menurut<sup>9</sup>, dalam upaya pengarusutamaan moderasi beragama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) harus melakukan transformasi berupa pemanfaatan ruang digital. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat beberapa PTKIN yang melakukan upaya tersebut, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dan perguruan tinggi lainnya yang juga telah mendirikan Rumah Moderasi.

Penelitian lebih mendalam mengenai upaya pengarusutamaan moderasi beragama di PTKIN dilakukan oleh<sup>10</sup>. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya pencegahan radikalisme agama di PTKIN tidak dilakukan dalam bentuk larangan, atau pemaksaan, tetapi dilakukan melalui perlawanan pasif, berupa pencegahan, larangan dan pengembangan program tandingan. Upaya tersebut antara lain (1) pendampingan kegiatan Pemahaman Budaya Akademik Mahasiswa (PBAK), (2) pengembangan Ma'had al Jami'ah, (3) pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (OMIK), (4) penggabungan materi modernisasi Islam ke dalam kurikulum perkuliahan dengan konsep *immersion curriculum* dan *hidden curriculum*, (5) memberikan pendampingan dan monitoring yang ketat dengan memaksimalkan peran dosen Pembimbing Akademik (PA), (6) mengembangkan keterbukaan melalui dialog terbatas dan (7) mengembangkan sikap kritis dan analitis melalui diskusi, seminar dan kuliah umum.

---

<sup>7</sup> Mahar Prastiwi, "Ini 4 Cara Cegah Paham Radikalisme Menyusup di Perguruan Tinggi," *KOMPAS.com*, February 5, 2021, <https://edukasi.kompas.com/read/2021/05/02/180549571/ini-4-cara-cegah-paham-radikalisme-menyusup-di-perguruan-tinggi?page=all> [21 Mei 2022].

<sup>8</sup> Toto Suharto and Ja'far Assagaf, "Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14 (1) 2014: 157–80.

<sup>9</sup> Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam*, 13 (1) 2020: 1–22.

<sup>10</sup> Yenrizal Muhammad Sirozi, "Preventing Religious Radicalism on College Student in the Islamic State Higher Education (PTKIN) Case Study of Islamic State University (UIN) in Indonesia," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17 (6) 2020: 7062–84.

Penelitian-penelitian di atas fokus mengungkap bagaimana upaya perguruan tinggi, dalam hal ini PTKIN dalam mengarusutamakan moderasi beragama sebagai upaya mencegah paparan radikalisme. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada pengungkapan profil moderasi beragama mahasiswa calon guru Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pengungkapan profil moderasi beragama ini didasarkan pada empat indikator yang ditetapkan oleh Kemenag RI, yaitu (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan, dan (4) penerimaan terhadap tradisi. Hasil penelitian diharapkan menjadi evaluasi program pengarusutamaan moderasi beragama di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Hal ini penting dilakukan mengingat lulusan PGMI memiliki peran strategis dalam membumikan moderasi agama sedini mungkin di jenjang pendidikan dasar.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuantitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual persepsi sampel terhadap fokus utama penelitian, yaitu moderasi beragama. Namun, data yang diperoleh tidak ditujukan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi terhadap populasi secara keseluruhan. Hal ini sekaligus menjadi keterbatasan penelitian. Peneliti tidak memberikan perlakuan apapun terhadap responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjumlah 697 mahasiswa. Adapun mahasiswa yang bersedia menjadi sampel adalah 106 mahasiswa, dengan rincian 81 (76,4%) mahasiswa Semester I, 14 (13,2%) mahasiswa Semester V, 9 (8,5%) mahasiswa Semester VII, sisanya 2 (1,9%) mahasiswa Semester III dan 1 (0,9%) mahasiswa Semester VI. Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah 15,2% dari jumlah keseluruhan mahasiswa Program Studi PGMI.

Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner tertutup dengan jumlah pertanyaan 25 butir. Kuesioner dibuat menggunakan aplikasi Google Form dan disebarikan melalui grup Whatsapp Angkatan mahasiswa. Adapun pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan empat indikator moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan, dan (4) penerimaan terhadap tradisi. Penggunaan empat indikator ini relevan dengan status lembaga di mana responden menempuh pendidikan, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan salah satu satuan kerja (satker) di bawah Kemenag RI, sehingga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama kepada mahasiswa.

Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan data yang terkumpul apa adanya tanpa melakukan generalisir. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian bukanlah untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, namun hanya ingin mendeskripsikan data dari sampel atau responden yang terlibat dalam penelitian. Penyajian data menggunakan tabel dan diagram yang didasarkan pada perhitungan persentase data.

## Hasil dan Pembahasan

Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), termasuk dalam hal ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki kewajiban baik secara formal maupun moral untuk mendukung upaya pemerintah dalam membudayakan dan melembagakan moderasi beragama. PTKIN dituntut menjadikan moderasi beragama sebagai satu di antara isu utama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat<sup>11</sup>.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut, Kemenag RI melalui Badan Litbang dan Diklat menerbitkan dua buku yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dua buku tersebut berupa buku referensi berjudul “Moderasi Beragama” dan buku saku dengan judul “Tanya Jawab Moderasi Beragama.” Menteri Agama berharap dua buku ini menjadi buku resmi Kemenag RI mengenai moderasi beragama dan diharapkan mampu menjadi rujukan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag RI<sup>12</sup>. Indikator moderasi beragama yang dikembangkan Kemenag RI dalam dua buku tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Indikator Moderasi Beragama ([www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id))

<sup>11</sup> Benny Andrios, “Menag Minta PTKIN Jadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama,” Government, *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), December 17, 2021, <https://www.kemenag.go.id/read/menag-minta-ptkin-jadi-pusat-pengembangan-moderasi-beragama> [19 Mei 2022].

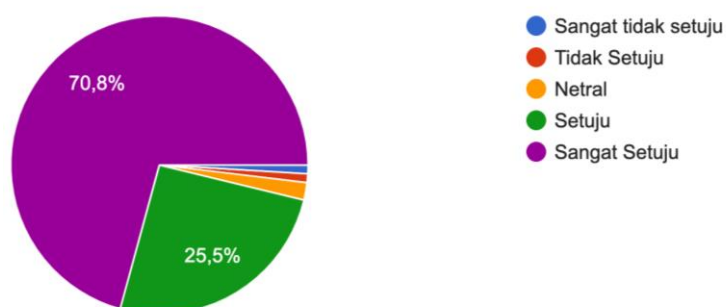
<sup>12</sup> Benny Andrios, “Segera Terbit Buku Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam,” Government, *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), July 9, 2021, <https://www.kemenag.go.id/read/segera-terbit-buku-moderasi-beragama-perspektif-bimas-islam> [21 Mei 2022].

Indikator moderasi beragama menurut Kemenag RI, sebagaimana tampak dalam gambar di atas meliputi empat sikap. Pertama, komitmen kebangsaan, yaitu sikap menerima prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi (UUD 1945 dan regulasi di bawahnya). Termasuk dalam hal ini adalah penerimaan terhadap ideologi Pancasila dan memiliki nasionalisme. Kedua, toleransi, yaitu sikap terbuka dan lapang dada dalam menerima perbedaan dan menghormati orang lain yang berbeda sebagai bagian dari dirinya. Ketiga, anti kekerasan, yaitu sikap menolak tindakan kekerasan perseorangan dan kelompok, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Keempat, penerimaan terhadap tradisi, yaitu sikap ramah dan akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama yang dianut<sup>13</sup>.

### **Komitmen Kebangsaan**

Bentuk negara kesatuan atau negara bangsa (*nation state*) telah menjadi konsensus bersama sejak Indonesia berdiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab I Pasal I, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kenyataan harus diterima oleh segenap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Sebagaimana dinyatakan pula dalam Pasal 27 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Meski demikian, sejak berdiri, Indonesia berkali-kali dihadapkan dengan gerakan separatis dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

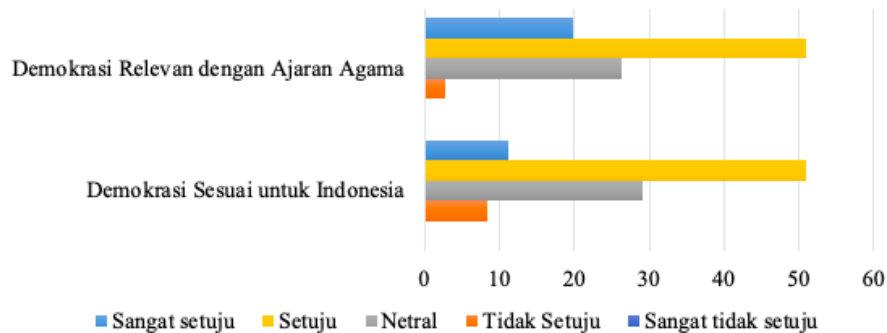
Komitmen kebangsaan dapat dideskripsikan melalui tiga komponen yang meliputi penerimaan terhadap bentuk negara kesatuan (NKRI) dan kesediaan menjaga keutuhannya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Profil sikap penerimaan terhadap NKRI responden dapat dilihat pada Gambar 2. Dalam gambar tersebut dapat dilihat sebanyak 75 (70,8%) responden menyatakan sangat setuju, 27 (25,5%) menyatakan setuju, dan 2 (1,9%) tidak mengambil sikap atau netral. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menerima bentuk negara kesatuan yang diterapkan di Indonesia. Meskipun terdapat 2 responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.



Gambar 2. Penerimaan terhadap NKRI

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

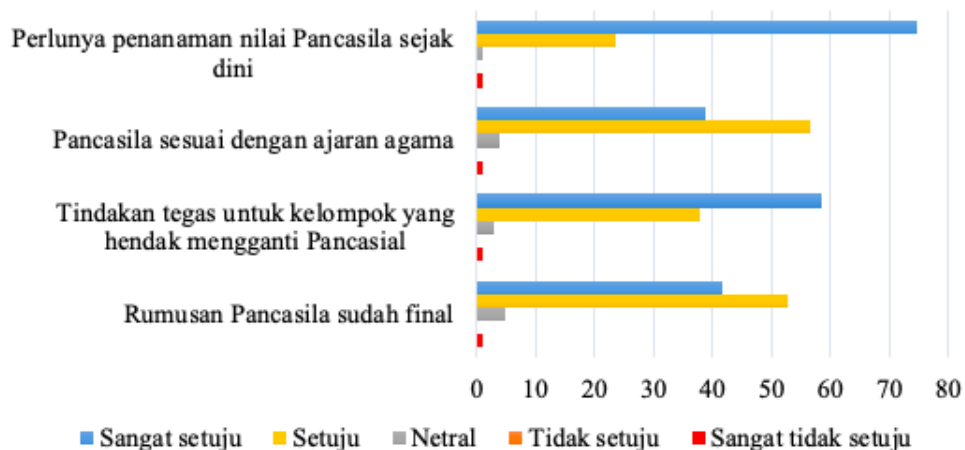
Adapun untuk data penerimaan terhadap sistem pemerintahan dapat dilihat dalam Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 54 (50,9%) responden sepakat bahwa demokrasi masih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Bahkan, 12 (11,3%) responden menyatakan sangat setuju. Namun demikian, terdapat 31 (29,2%) responden bersikap netral dan sebanyak 9 (8,5%) menyatakan tidak setuju. Sementara, dalam aspek relevansi demokrasi dengan ajaran agama, respons yang muncul hampir sama. Sebanyak 54 (50,9%) responden menyatakan setuju dan 21 (19,8%) responden sangat setuju. Sedangkan responden yang bersikap netral sebanyak 28 (26,4%). Pada aspek ini pun, terdapat responden yang tidak setuju, yaitu sebanyak 3 (2,8%).



Gambar 3. Penerimaan terhadap Demokrasi

Pada komponen kedua, yaitu penerimaan terhadap Pancasila, respons yang ditunjukkan oleh responden cenderung homogen, yaitu menerima dan menyetujui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Profil respon untuk komponen ini dapat dilihat pada Gambar 4. Komponen ini dideskripsikan ke dalam empat aspek, yaitu (1) penerimaan terhadap kedudukan final rumusan Pancasila; (2) perlunya tindakan tegas kepada kelompok yang hendak mengganti Pancasila; (3) kesesuaian Pancasila dengan ajaran agama; dan (4) perlunya penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Pada aspek pertama, hampir semua responden menyatakan setuju, rinciannya yaitu 56 (52,8%) setuju dan 44 (41,5%) sangat setuju. Responden yang bersikap netral sebanyak 5 orang atau 4,7%. Sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,9%.

Terkait dengan aspek kedua yaitu perlunya tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang hendak mengganti Pancasila, hampir semua responden menyatakan setuju. Adapun rinciannya adalah 62 responden atau 58,5% sangat setuju dan 40 atau 37,7% setuju. Sikap netral ditunjukkan oleh 3 responden atau 2,8% dan sikap menolak atau tidak setuju ditunjukkan oleh 1 responden (0,9%). Pada aspek ketiga, sebanyak 60 responden atau 56,6% menyatakan setuju dan sebanyak 41 (38,7%) sangat setuju. Sementara responden yang bersikap netral sebanyak 4 orang atau 3,8% dan yang sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 0,9%. Sementara untuk aspek keempat, hampir semua responden sependapat, yaitu 79 (74,5%) sangat setuju dan 25 (23,6%) setuju. Respon netral dan sangat tidak setuju ditunjukkan oleh masing-masing 1 orang responden.



Gambar 4. Penerimaan terhadap Pancasila

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau hampir semua responden memenuhi indikator komitmen kebangsaan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase sikap setuju yang tinggi terhadap tiga deskriptor indikator ini. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang menyatakan tidak setuju dengan tiga deskriptor tersebut. Deskriptor yang mendapatkan respons tidak setuju paling banyak adalah penerimaan terhadap demokrasi, yaitu sebanyak 3 responden atau 2,8%. Data ini perlu ditelusur lebih lanjut untuk mengetahui apa motif dibalik sikap ketidaksetujuan tersebut. Mengingat posisi responden sebagai calon pendidik, eksistensi komitmen kebangsaan dalam diri responden memainkan peran penting.

Keberadaan komitmen kebangsaan dapat berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab responden kelak sebagai pendidik. Mereka berkewajiban menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam diri peserta didik, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai yaitu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab<sup>14</sup>. Terlebih lagi, tantangan untuk menumbuhkan sikap komitmen kebangsaan sekarang semakin sulit. Menurut Yani (2013) dalam Lestari (2019), di antara faktor penyebab memudarnya nasionalisme adalah sikap keluarga dan lingkungan sekitar (termasuk sekolah) yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme, derasnya arus globalisasi, dan meningkatnya kecintaan pada produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Faktor lainnya yang menyebabkan memudarnya nasionalisme adalah pelaksanaan demokrasi yang tidak konsekuen dan perilaku menyimpang para elit politik<sup>15</sup>.

### **Toleransi**

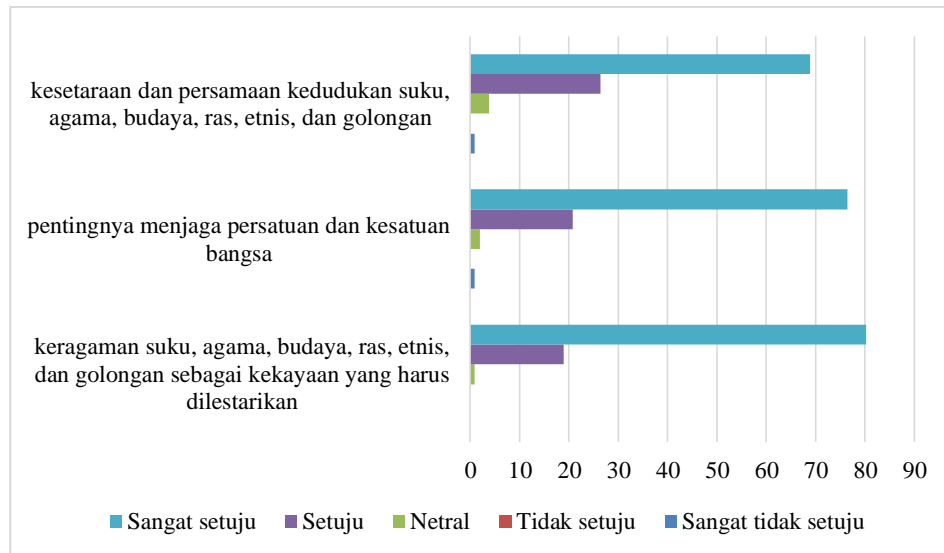
Indikator toleransi dapat dideskripsikan ke dalam dua komponen, yaitu toleransi terhadap perbedaan atau keragaman budaya dan toleransi terhadap keragaman agama. Komponen pertama, meliputi aspek penerimaan atas keragaman suku, agama, budaya,

<sup>14</sup> Tajuddin Noor, "Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003," *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3 (01) 2018.

<sup>15</sup> Sahma Nada Afifah Ekaprasetya, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, "Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Generasi Millennial Di Era Globalisasi Melalui Pancasila," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (3) 2021: 7853–58.



ras, etnis, dan golongan sebagai kekayaan yang harus dilestarikan, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesetaraan dan persamaan kedudukan suku, agama, budaya, ras, etnis, dan golongan. Respons yang diberikan oleh responden dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Toleransi terhadap Keragaman Budaya

Pada aspek pertama, dapat disimpulkan semua responden setuju bahwa keragaman suku, agama, budaya, ras, etnis, dan golongan merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Respons pada aspek kedua juga hampir sama, namun ada 2 (1,9%) responden yang bersikap netral dan 1 (0,9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan pada aspek ketiga, responden yang netral bertambah menjadi 4 (3,8%) dan yang sangat tidak setuju tetap 1 (0,9%) responden.

Selanjutnya, untuk komponen kedua dari toleransi dapat dideskripsikan melalui 11 aspek. Respon dari responden terhadap 11 aspek ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Data dalam tabel tersebut menunjukkan respons yang diberikan cukup variatif. Responden masih dapat mentoleransi perbedaan keyakinan sepanjang dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan aspek utama keberagamaan (akidah).

Tabel 1. Toleransi Keragaman Agama

No.	Aspek Toleransi	Respons (%)					Total
		STS	TS	N	S	SS	
1	Tidak masalah memiliki tetangga berbeda agama	0,9	0	5,7	50	43,4	100
2	Selalu bersikap baik kepada umat beragama lain	0	0	6,6	46,2	47,2	100
3	Bersedia menerima pemberian dari umat beragama lain	0	0,9	48,1	37,7	0	100
4	Memberi ucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain	1,9	13,2	44,3	30,2	10,4	100
5	Bersedia menghadiri undangan dari	1,9	6,6	60,4	26,4	4,7	100

	umat beragama lain						
6	Bersedia bekerjasama dengan umat beragama lain	0,9	2,8	43,4	36,8	16	100
7	Mengizinkan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di dekat tempat tinggal	2,8	1,9	42,5	41,5	11,3	100
8	Bersedia membantu umat beragama lain mendirikan rumah ibadah	7,5	9,4	46,2	27,4	9,4	100
9	Memiliki pemimpin dari umat beragama lain	8,5	24,5	43,4	19,8	3,8	100
10	Doa bersama dengan umat beragama lain merupakan tradisi yang baik	5,7	23,6	45,3	20,8	4,7	100
11	Pernikahan beda agama merupakan hak setiap orang dan tidak perlu dilarang	17	33	34,9	12,3	2,8	100

**Keterangan:**

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Data dalam Tabel 1 menunjukkan resistensi sikap toleransi cenderung tinggi pada aspek-aspek yang berkaitan atau dekat dengan prinsip pokok keyakinan agama (akidah). Hal ini sebagaimana terlihat dari respons terhadap aspek 8, sebanyak 7,5% sangat tidak setuju dan 9,4% tidak setuju. Angka tersebut meningkat pada aspek 9, dimana sebanyak 8,5% responden sangat tidak setuju dan 24,5% tidak setuju. Sikap resistensi ini semakin meningkat pada aspek 11, dimana sebanyak 17% responden sangat tidak setuju dan 33%.

Sikap toleransi merujuk pada sikap terbuka dan lapang dada dalam menerima perbedaan dan menghormati orang lain yang berbeda sebagai bagian dari dirinya<sup>16</sup>. Menurut Simon Blackburn (2017) dalam<sup>17</sup>, toleransi adalah menahan diri bertindak dari hal yang tidak disetujui dalam persoalan agama, politik dan sebagainya yang dipandang asing dalam perspektif seseorang. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, toleransi berarti menerima perbedaan dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis, bahasa, dan golongan. Sikap ini berperan penting dalam menjaga integrasi nasional.

Toleransi berperan penting dalam mendukung pengarusutamaan moderasi beragama. Munculnya radikalisme hingga terorisme dipicu oleh hilangnya toleransi dan munculnya sikap intoleran. Kelompok-kelompok radikal dan teroris pada umumnya anti terhadap perbedaan paham, terutama paham keagamaan. Umat beragama yang tidak

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

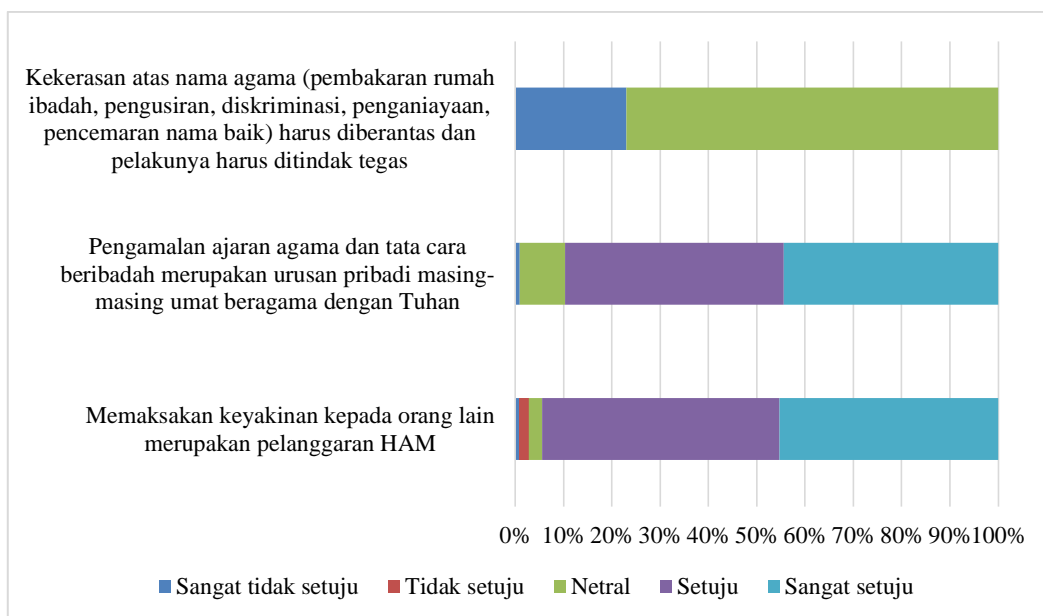
<sup>17</sup> Rifki Rosyad et al., "Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial" (Lekkas, 2021).

sepaham atau pahamnya bertentangan dengan mereka, dianggap sebagai musuh. Sikap demikian ini muncul lantaran sempitnya pemahaman terhadap dogma agama. Teks suci dipahami secara tekstualis tanpa memperhatikan konteks sejarahnya. Dalam Islam misalnya, banyak ayat Al-Qur'an yang secara tekstual mengarah pada gerakan radikal, seperti perintah memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah dalam Surah at-Taubah [9] ayat 29<sup>18</sup>.

### **Anti Kekerasan**

Anti kekerasan merujuk pada sikap menolak tindakan kekerasan perseorangan dan kelompok, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Dalam konteks ini, aspek yang diukur meliputi pemaksaan keyakinan kepada orang lain, pengamalan ajaran agama dan ibadah merupakan urusan individu masing-masing, dan kekerasan atas nama agama harus ditindak tegas. Aspek pertama menunjukkan hampir semua respondens sepakat bahwa memaksakan keyakinan kepada orang lain merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sungguh pun demikian, terdapat 1 (0,9%) responden menyatakan sangat tidak setuju dan 2 (1,9%) tidak setuju. Sedangkan sisanya 3 (2,8%) bersikap netral.

Pada aspek kedua, sebagian besar responden sepakat bahwa pengamalan agama dan tata cara beribadah merupakan wilayah privasi masing-masing individu dengan rincian 47 (44,3%) sangat setuju dan 48 (45,3%) setuju. Adapun yang bersikap netral sebanyak 10 (9,4%) dan yang sangat tidak setuju sebanyak 1 (0,9%). Sementara pada aspek terakhir, hampir semua responden sepakat bahwa kekerasan atas nama agama harus diberantas dan ditindak tegas. Hanya ada 1 (0,9%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Data respons terhadap komponen anti kekerasan ini dapat dilihat dalam Gambar 6 berikut.

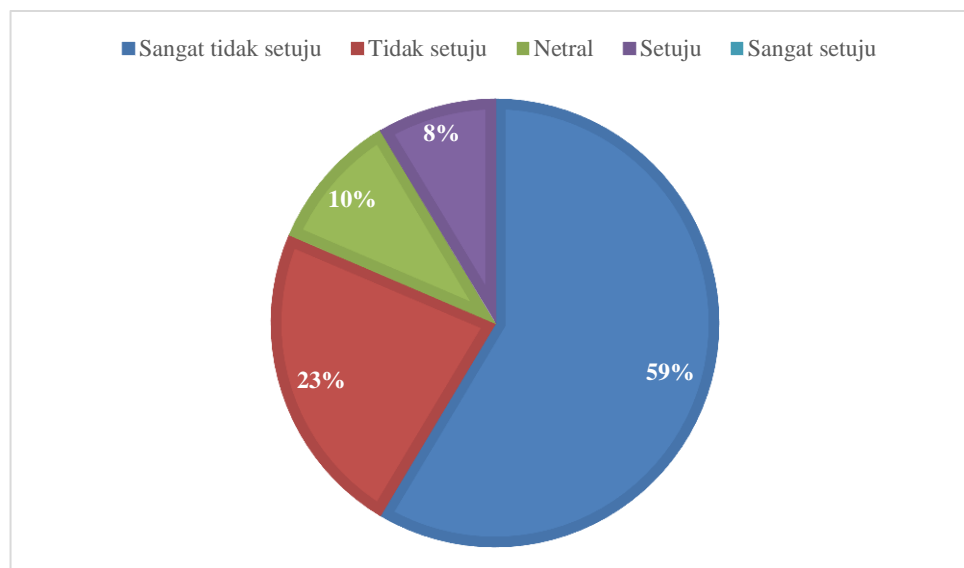


Gambar 6. Anti Kekerasan

<sup>18</sup> Muchith, "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan."

### ***Penerimaan terhadap Tradisi***

Sebagai negara kesatuan dengan tingkat keragaman budaya yang tinggi, eksistensi tradisi yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, antara suku, agama, dan ras satu dengan yang lain merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, Kemenag RI menetapkan bahwa penerimaan terhadap tradisi menjadi salah satu indikator moderasi beragama. Indikator ini merujuk pada sikap ramah dan akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama yang dianut. Dalam hal ini, hampir semua responden sepakat bahwa tradisi selamatan, sekaten, tabot, halal bi halal, grebeg, haul, wiwit, mitoni, dan sebagainya merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Sebanyak 48 (45,3%) responden sangat setuju dan 47 (44,3%) setuju. Adapun sisanya bersikap netral yaitu 11 (10,4%) responden. Data respons ini dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Penerimaan terhadap Tradisi

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai umat beragama yang moderat dalam aspek penerimaan terhadap tradisi. Sikap ini penting selain sebagai pilar moderasi beragama, juga sebagai pilar untuk menjaga dan memperkuat integrasi bangsa. Sikap apatis dan anti terhadap kekayaan tradisi sangat berpotensi menyulut perpecahan antar elemen bangsa. Kasus kontroversi hukum Wayang Kulit dan Dalang yang sempat viral beberapa waktu lalu merepresentasikan hal ini. Kasus yang bersumber dari potongan video ceramah seorang mubaligh tersebut menimbulkan perdebatan panas, bahkan pelaporan kepada polisi. Hal tersebut tidak akan terjadi jika sikap penerimaan terhadap tradisi sebagaimana dijabarkan oleh Kemenag RI dalam buku Moderasi Beragama tertanam kuat dalam diri setiap anak bangsa<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag," *Harmoni*, 18 (2) 2019: 182–86.

## Kesimpulan

Pengarusutamaan moderasi beragama di jenjang Perguruan Tinggi (PT) urgen untuk dilakukan sebagai upaya membendung penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa. Data menunjukkan bahwa radikalisme telah lama masuk di lingkungan Perguruan Tinggi. Penyebaran paham ini dilakukan oleh organisasi dakwah mahasiswa, baik di dalam, maupun di luar kampus. Adapun respondens dalam penelitian ini, secara garis besar dapat disimpulkan belum terpapar ideologi atau paham radikal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentasi sikap setuju terhadap empat indikator moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, yaitu (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan, dan (4) penerimaan terhadap tradisi.

Meski demikian, terdapat beberapa responden yang menunjukkan resistensi atau ketidaksetujuan terhadap empat indikator tersebut. Peneliti belum melakukan penelusuran secara mendalam terhadap faktor penyebab munculnya data tersebut. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan. Selain itu, Program Studi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan penanggungjawab mahasiswa respondens penelitian ini perlu untuk melakukan evaluasi terhadap program pembinaan moderasi beragama yang sudah dilakukan setiap tahun melalui kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK).

## Daftar Pustaka

- Andrios, Benny. "Menag Minta PTKIN Jadi Pusat Pengembangan Moderasi Beragama." Government. *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), December 17, 2021. <https://www.kemenag.go.id/read/menag-minta-ptkin-jadi-pusat-pengembangan-moderasi-beragama>.
- . "Segera Terbit Buku Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam." Government. *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), July 9, 2021. <https://www.kemenag.go.id/read/segera-terbit-buku-moderasi-beragama-perspektif-bimas-islam>.
- Ariefana, Pebriansyah, and Ummi Hadyah Saleh. "Menristek Sebut Sudah Lama 10 Perguruan Tinggi Terpapar Radikalisme." *suara.com*. March 6, 2019. <https://www.suara.com/news/2019/06/03/135655/menristek-sebut-sudah-lama-10-perguruan-tinggi-terpapar-radikalisme>.
- Asriani, S. H., and ASR MH. "Radikalisme Pemahaman Keagamaan Pada Mahasiswa Muslim Di Perguruan Tinggi Agama Islam Di Provinsi Lampung." LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- CNN Indonesia. "Ketua Komisi X Sebut Penyebaran Radikalisme di Kampus Nyata." *CNN Indonesia*. September 16, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915115742-32-694604/ketua-komisi-x-sebut-penyebaran-radikalisme-di-kampus-nyata>.
- Ekaprasetya, Sahma Nada Afifah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Generasi Millennial Di Era Globalisasi Melalui Pancasila." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (3) 2021: 7853–58.

- Hefni, Wildani. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam*, 13 (1) 2020: 1–22.
- Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni*, 18 (2) 2019: 182–86.
- Lestari, Eta Yuni. "Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila." *ADIL Indonesia Journal*, 1 (1) 2019.
- Muchith, Muhammad Saekan. "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan." *Addin*, 10 (1) 2016: 163–80.
- Muhammad Sirozi, Yenrizal. "Preventing Religious Radicalism on College Student in the Islamic State Higher Education (PTKIN) Case Study of Islamic State University (UIN) in Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17 (6) 2020: 7062–84.
- Murtadlo, Muhamad. "Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi." Government. *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), May 12, 2022. <https://kemenag.go.id/read/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi-6v3kp>.
- Noor, Tajuddin. "Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003." *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3 (01) 2018.
- Prastiwi, Mahar. "Ini 4 Cara Cegah Paham Radikalisme Menyusup di Perguruan Tinggi." *KOMPAS.com*. February 5, 2021. <https://edukasi.kompas.com/read/2021/05/02/180549571/ini-4-cara-cegah-paham-radikalisme-menyusup-di-perguruan-tinggi?page=all>.
- Rahayu, Lisyie Sri. "Menhan Sebut 23,4% Mahasiswa di RI Terpapar Radikalisme." *detik.com*. July 19, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-234-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme>.
- Rosyad, Rifki, M. F. Mubarak, M. Taufiq Rahman, and Yeni Huriani. "Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial." Lekkas, 2021.
- Suharto, Toto, and Ja'far Assagaf. "Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14 (1) 2014: 157–80.
- Sumandoyo, Arbi. "Radikalisme di Kampus Berkembang Karena Tak Ada Gerakan Tandingan." *tirto.id*. July 20, 2018. <https://tirto.id/radikalisme-di-kampus-berkembang-karena-tak-ada-gerakan-tandingan-cPqQ>.
- Suwarno, Suwarno. "Ancaman Radikalisme di Kampus Nyata, Warning Jokowi Masuk Akal." *SINDONEWS.com*. September 15, 2021. <https://edukasi.sindonews.com/read/541218/144/ancaman-radikalisme-di-kampus-nyata-warning-jokowi-masuk-akal-1631682597>.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, (2019). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.